KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembagian Tupoksi Pimpinan DPR Tuntas
Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pembagian Tupoksi Pimpinan DPR Tuntas

PEMBAGIAN tugas kepada empat Wakil Ketua DPR akhirnya tuntas. Pembagian tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) pendamping Ketua DPR Puan Maharani didasarkan pada perolehan suara atau kursi partai di parlemen.

Berdasarkan Rapat Pimpinan DPR diputuskan Aziz Syamsuddin (Fraksi Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Gerindra) menjadi Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan, Rachmat Gobel (Fraksi Nasdem) menjadi Wakil Ketua DPR bidang Industri dan Pembangunan, dan terakhir Muhaimin Iskandar (Fraksi PKB) menjabat Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat atau Kesra.

"Kami sudah mengambil satu keputusan tentang pembidangan yang akan dipikul dan menjadi tanggung jawab kami. Saya sudah berikan Tupoksi pada wakil yang ada. Tupoksi yang sudah dibagikan kepada tiap-tiap Pimpinan DPR dapat dilaksanakan secara gotong royong," kata Puan di Jakarta, kemarin.

Puan menegaskan, bersama Pimpinan DPR lainnya akan berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan lebih baik. Bagaimanapun, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan DPR dan sudah barang tentu akan banyak dinamika yang terjadi.

"Perbedaan dalam kebijakan politik adalah hal biasa namun jangan sampai gotong royong itu tercerai berai karena kepentingan politik. Bagaimana komitmen jaga NKRI utuh, karena parpol salah satu pilar demokrasi, itu kami jaga bersama," ujar Puan.

Dalam kesempatan terpisah, Puan menuturkan, DPR akan menetapkan jumlah komisi terlebih dahulu sebelum berlanjut membahas pembagian posisi ketua dan wakil ketua masing-masing komisi.

"Berapa jumlah anggota setiap fraksi, berapa komisi yang akan ditentukan, kemudian setiap fraksi akan mendapatkan berapa pimpinan atau anggota yang akan masuk ke dalam setiap komisi," kata Puan.

Puan memastikan, pembagian jatah ketua atau wakil ketua untuk setiap komisi akan dibagi rata sesuai dengan aturan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan perolehan suara atau kursi setiap fraksi. Diharapkan, proses penentuan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR dilakukan secara musyawarah mufakat.

"Yang terjadi lima tahun lalu itu saya berharap dalam proses demokrasi kepemimpinan atau pun proses DPR yang sekarang ini, saya berharap tidak akan terjadi lagi. Karena apa pun itu menjadi luka sejarah bahwa proses demokrasi yang sudah kita lakukan melalui proses pemilu kemudian menjadi berantakan karena kemudian kita tidak saling menghargai dan menghormati," tutur Puan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tidak mempermasalahkan kursi Pimpinan DPR koordinator bidang politik dan keamanan tidak lagi dipegang Gerindra. Sebagaimana diketahui, di periode lalu, Wakil Ketua DPR bidang politik dan keamaman diemban oleh Fadli Zon. Menurutnya, pemilihan tupoksi Pimpinan DPR sudah berbeda dengan lima tahun lalu. ■ KAL